

LKjIP 2021

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA BUKITTINGGI



BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022



HANTARAN KATA

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan pelaporan kinerja untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan visi-misi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga sebagai media pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini dapat memberikan masukan bagi peningkatan kinerja, pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang.

Bukittinggi, Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Drs. Martias Wanto, M.M.
NIP. 196603011986021002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan instansi pemerintah yang memuat pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKjIP SKPD) disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Tahunan SKPD dan Rancangan Awal RKPD serta berpedoman pada Renstra SKPD.

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra, Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan 3 (tiga) program dan melaksanakan 19 (sembilan belas) kegiatan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kota Bukittinggi untuk mendukung 3 (tiga) tujuan dan 8 (delapan) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian sebagai berikut :

1. Rasio CSR dgn belanja langsung APBD dalam pembiayaan pembangunan dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 115% dengan kategori sangat baik.
2. Peringkat EKPP dan LPPD dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) belum dapat ditentukan karena masih menunggu SK Menteri Dalam Negeri.
3. Jumlah MoU tahun berjalan dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 133% dengan kategori sangat baik.

4. Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 100% dengan kategori sangat baik.
5. Persentase sarana ibadah aktif dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 100% dengan kategori sangat baik.
6. Persentase lembaga agama yang aktif dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 100% dengan kategori sangat baik.
7. Nilai evaluasi SAKIP Kota dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) belum dapat ditentukan karena nilai SAKIP 2021 belum keluar.
8. Indeks Kematangan Organisasi Kota Bukittinggi dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 86% dengan kategori sangat baik.
9. Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 99% dengan kategori sangat baik.
10. Persentase informasi yang direspon tidak dapat dihitung karena sub kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut pindah ke Diskominfo.
11. Persentase pewarta yang aktif memberikan informasi tidak dapat dihitung karena sub kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut pindah ke Diskominfo.
12. Jumlah komoditas yang dikendalikan dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 100% dengan kategori sangat baik.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 47.018.222.249,84 dari total anggaran setelah refocusing dan perubahan anggaran sebesar Rp. 58.930.043.126,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 80%.



DAFTAR ISI

	Hal.
HANTARAN KATA	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1 Latar Belakang	5
I.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	6
I.3 Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	11
I.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
II.1 Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	13
II.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
III.2 Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	66
IV.1 Kesimpulan	66
IV.2 Strategi Peningkatan Kinerja	67



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian visi, misi, realisasi pencapaian indikator.

Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi sebagai unsur pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini telah tertuang pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi. Dalam LKIP Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi pengukuran kinerja yang dilakukan dengan mengukur 8 (delapan) sasaran dan 12 (dua belas) Indikator yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi 2016-2021 yang memiliki beberapa indikator kinerja sasaran sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja setiap akhir tahun anggaran akan diketahui keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Dari hasil

evaluasi kinerja ini akan menjadi acuan bagi para pihak yang berwenang untuk memutuskan wajar dan tidaknya suatu kegiatan diadakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Perwujudan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan, penghematan, peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi.
4. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi sebagai suatu lembaga pemerintahan daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang terdiri dari 9 Bagian, masing - masing bagian terdiri dari 3 Sub Bagian yang tugas dan fungsinya diatur dengan Perwako Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah BAB II pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka pada ayat (3) diuraikan fungsi dari Sekretariat Daerah, yaitu :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan,
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tertuang pada BAB II Pasal 3 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 54 Tahun 2020 yang terdiri atas;

1. Sekretaris Daerah, membawahi 3 Asisten :

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- 3) Asisten Administrasi Umum

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 Bagian :

- 1) Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Bagian Hukum, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Perundang - Undangan
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 Bagian :

- 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
 - b) Sub Bagian Perekonomian
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 Bagian

1) Bagian Umum, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

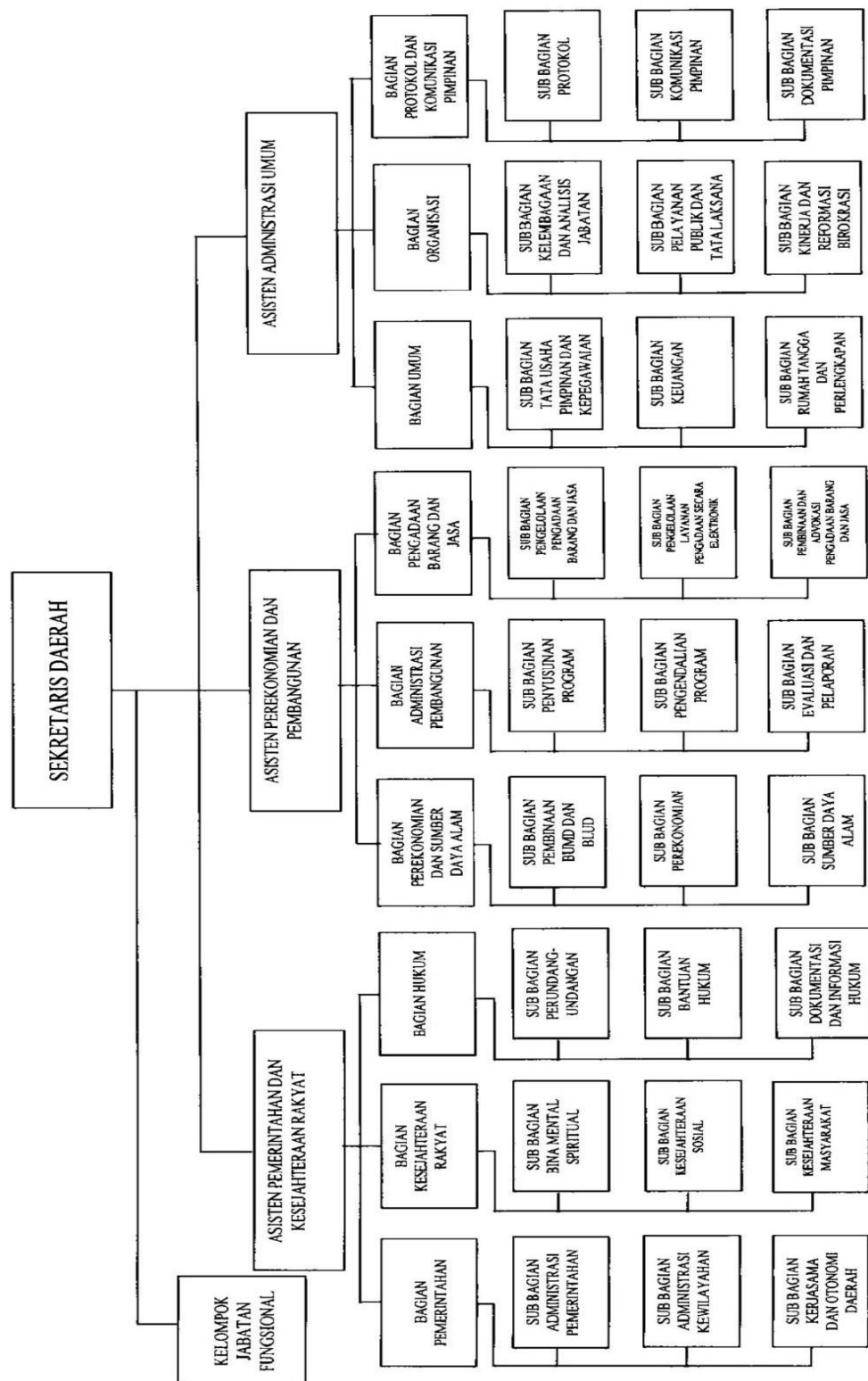
2. Bagian Organisasi, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas

- a) Sub Bagian Protokol
- b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
- c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional



I.3 Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

Berdasarkan telaahan terhadap tugas pokok dan fungsi, visi misi kepala daerah dan telaahan terhadap Renstra kementerian lembaga dan pemerintahan propinsi maka ditetapkan isu strategis sekretariat daerah sebagai berikut :

1. Partisipasi pihak swasta dan pendonor terhadap pembangunan Kota Bukittinggi berupa pembiayaan pembangunan masih rendah;
2. Masih minimnya MoU kerjasama dan perjanjian kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dengan daerah lain dan yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama;
3. Masih banyaknya produk hukum daerah yang sudah tidak relevan dengan ketentuan perundangan-undangan dan kondisi riil daerah;
4. Kualitas evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah masih belum optimal;
5. Kota Bukittinggi termasuk daerah Sumbar bagian utara yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan menjadi barometer serta barometer inflasi;
6. Realisasi belanja modal pembangunan masih belum maksimal;
7. Bukittinggi menjadikan nilai-nilai adat dan agama sebagai landasan pembangunan namun masih terdapat rumah ibadah dan lembaga pendidikan yang belum berjalan dengan baik.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai latar belakang, gambaran umum organisasi, isu strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja memuat tentang rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja memuat penjelasan mengenai capaian kinerja organisasi dan realiasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dan strategi peningkatan kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang wajib disusun dan disajikan, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Untuk penyusunan laporan kinerja tidak terlepas dari rencana strategis instansi pemerintah karena rencana strategis merupakan langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

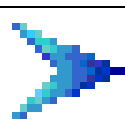
II.1 Rencana Strategis

Acuan bagi penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran dari pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah terpilih. Didalam Renstra SKPD memuat program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah yaitu membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Dan selanjutnya Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi

penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.

- Visi Kota Bukittinggi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah :



Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya

- Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Bukittinggi. Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).
2. Misi 2 : Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Misi 4 : Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.

➤ **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi terkait dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembiayaan pembangunan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kota Bukittinggi
3. Terkendalinya Inflasi.

➤ **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang hendak dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib
3. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat

5. Mewujudkan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif
6. Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
7. Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah
8. Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Pada tabel berikut dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dimana dalam setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur atas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

TABEL 2.1
MATRIKS HUBUNGAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Sasaran
1.	Misi 1 : Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)	1.	Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembiayaan pembangunan	1.	Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha
2.	Misi 2 : Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Kota Bukittinggi	2.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib
				3.	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan
				4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat
				5	Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Sasaran
				6	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
				7	Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah
3.	Misi 4 : Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna	3	Terkendalinya Inflasi	8	Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah

II.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam periode satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dalam menyusun perjanjian kinerja mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan anggaran atau DPA. Perjanjian kinerja tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	2,5
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	Peringkat EKPP dan LPPD	30
		Jumlah MoU	6
3	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100
4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat	Persentase sarana ibadah aktif	100
		Persentase lembaga agama yang aktif	100
5	Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	Nilai evaluasi SAKIP Kota	A
		Indeks Kematangan Organisasi	50
6	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	100
7	Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah	Persentase informasi yang direspon	55
		Persentase pewarta yang aktif memberikan informasi	100
8	Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	Jumlah komoditas yang dikendalikan	100

Dalam pelaksanaan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut, didukung dengan program dan kegiatan dengan uraian alokasi anggaran sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021

Tabel 2.3**Program dan Pagu Anggaran Tahun 2021**

	PROGRAM		ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	32,550,319,707.00	36,562,957,163.00
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp	20,029,190,565.00	20,597,618,000.00
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp	1,483,666.413.00	1,769,467,963.00
	JUMLAH	Rp	54,063,176,685.00	58,930,043,126.00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi-misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2021.

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2021 dilihat dari capaian kinerja setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan.

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Gagal

Pengukuran capaian kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada organisasi. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara kinerja dan target yang telah ditetapkan.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	2,5	2,87	115%
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	Peringkat EKPP dan LPPD	30	-	Menunggu SK Mendagri
		Jumlah MoU	6	8	133%
3	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	100	100%
4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat	Persentase sarana ibadah aktif	100	100	100%
		Persentase lembaga agama yang aktif	100	100	100%
5	Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	Nilai evaluasi SAKIP Kota	A	-	Nilai Belum Keluar
		Indeks Kematangan Organisasi	50	42,96	86%
6	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	100	99	99%

7	Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah	Persentase informasi yang direspon	55	-	Kegiatan pindah ke Diskominfo
		Persentase pewarta yang aktif memberikan informasi	100	-	Kegiatan pindah ke Diskominfo
8	Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	Jumlah komoditas yang dikendalikan	100	100	100%
Rata-rata					104%

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian rata-rata indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 8 sasaran strategis adalah sebesar 104%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis tahun 2021 termasuk kategori **sangat baik**.

Analisis Pencapaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis yang hendak dicapai. Pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis beserta indikator keberhasilan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis



1. Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha

Sasaran Strategis dari “meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha” di ukur dengan indikator rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD.

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	2,5	2,87	115%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis “meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha” tahun 2021 adalah sebesar 115%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	=	Jumlah anggaran CSR/ jumlah belanja langsung APBD
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------

Capaian indikator rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD pada Tahun 2021 adalah sebesar 115%.

Pada tahun 2021 rasio CSR dengan belanja langsung APBD dalam pembiayaan pembangunan adalah sebesar 2,87 artinya bantuan yang diberikan

perusahaan dengan menyalurkan CSR nya adalah 2,87% dari jumlah APBD Kota.

Untuk pengelolaan CSR dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1 Menghimpun usulan CSR dari SKPD dan masyarakat.
Pemerintah Kota Bukittinggi baru mulai menghimpun usulan CSR pada tahun 2017.
- 2 Menyampaikan usulan kepada perusahaan-perusahaan potensial pemberi CSR.
- 3 Menunggu realisasi dari pihak pemberi.
- 4 Membantu proses serah terima apabila diberikan melalui Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sasaran Strategis



2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib

Sasaran Strategis dari “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib” di ukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Peringkat EKPP dan LPPD
2. Jumlah MoU.

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	Peringkat EKPP dan LPPD	30	-	Menunggu SK Mendagri
	Jumlah MoU	6	8	133%
	Rata-rata			-

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis “mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib” tahun 2021 belum dapat diukur karena Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 masih menunggu SK Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, maka pencapaian sasaran strategis belum dapat ditentukan.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Peringkat EKPP dan LPPD	=	Hasil Evaluasi Kemendagri
-------------------------	---	---------------------------

Disebabkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 masih menunggu SK Menteri Dalam Negeri maka capaian kinerja indikator Peringkat EKPP dan LPPD belum dapat diukur.

Jumlah MoU	=	Jumlah MoU yang sudah dibuat pada tahun berjalan
------------	---	--------------------------------------------------

Pada tahun 2021 jumlah MoU yang sudah dibuat pada tahun berjalan sebanyak 8 buah MoU, dimana melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 6 buah MoU dengan capaian indikator sebesar 133%.

MoU yang dibuat pada tahun 2021 antara lain :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera barat tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan CV. Bukittinggi Karya Nusa tentang Kerja Sama Operasional Pungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum Tahun 2021 Kawasan Pasar Atas dan Sekitarnya.
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan CV. Kemilau Konstruksi tentang Kerja Sama Operasional Pungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum Tahun 2021 Kawasan Pasar Bawah dan Sekitarnya.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan PT. Kreatifika Mandiri Sejahtera tentang Kerja Sama Operasional Pungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum Tahun 2021 Kawasan Simpang Aur dan Sekitarnya.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PT Bank Nagari tentang Penyediaan Layanan Perbankan Dalam Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Tempat Rekreasi Kota Bukittinggi.
6. Nota Kesepakatan antara Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi tentang Pelayanan Terintegrasi dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Perkawinan.
7. Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi tentang Pelayanan Terintegrasi Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang telah Mempunyai Kekuatan Tetap (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*).
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumbar tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Sasaran Strategis



3. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan

Sasaran Strategis dari “meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan” di ukur dengan indikator persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis “meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan” tahun 2021 adalah sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	=	Jumlah produk hukum yang sudah sesuai ketentuan perundang-undangan/ Jumlah seluruh produk hukum yang disusun pada tahun berjalan x 100%
---------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capaian indikator persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada Tahun 2021 adalah sebesar 100% produk hukum daerah.

Dalam pelaksanaan perancangan dan perumusan produk hukum daerah tahun 2021 telah dihasilkan sebanyak 436 produk hukum yang terdiri dari 12 peraturan daerah, 66 peraturan walikota dan 358 surat keputusan walikota.

Dalam rangka pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan produk hukum daerah, yang dilaksanakan oleh Tim Perancang dan Perumusan Produk Hukum Daerah yang membuat aturan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar/landasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kota Bukittinggi.

Sasaran Strategis



4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat

Sasaran Strategis dari “peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat” di ukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Persentase sarana ibadah aktif
2. Persentase lembaga agama yang aktif.

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat	Persentase sarana ibadah aktif	100	100	100%
	Persentase lembaga agama yang aktif	100	100	100%
	Rata-rata			100%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis “peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat” tahun 2021 adalah sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Persentase sarana ibadah aktif	=	Jumlah sarana ibadah aktif / jumlah keseluruhan sarana ibadah
--------------------------------	---	---------------------------------------------------------------

Jumlah sarana ibadah yang ada di Kota Bukittinggi tahun 2021 ada 199 buah, terdiri dari masjid sebanyak 47 buah, mushalla sebanyak 150 buah dan gereja sebanyak 2 buah dengan capaian indikator sebesar 100%, artinya semua sarana ibadah aktif melaksanakan kegiatan ibadah ditempatnya.

Persentase lembaga agama yang aktif	=	Lembaga agama yang aktif / Jumlah keseluruhan lembaga agama
-------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------

Pada tahun 2021 ada 1 lembaga agama yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi. Persentase lembaga agama yang aktif 100% itu artinya lembaga agama yang ada di Kota Bukittinggi aktif melaksanakan kegiatan keagamaan. Hal ini menandakan bahwa pengurus lembaga agama sudah turut aktif melaksanakan kegiatan keagamaan.

Sasaran Strategis



5. Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif

Sasaran Strategis dari “mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif” di ukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi SAKIP Kota
2. Indeks Kematangan Organisasi.

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	Nilai evaluasi SAKIP Kota	A	-	Nilai Belum Keluar
	Indeks Kematangan Organisasi	50%	42,96%	86%
	Rata-rata			-

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis “mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif” tahun 2021 belum dapat diukur karena nilai evaluasi SAKIP Kota masih

menunggu SK Menteri PAN_RB diumumkan. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, maka keberhasilan pencapaian sasaran strategis belum dapat ditentukan.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Nilai evaluasi SAKIP Kota	=	Nilai evaluasi SAKIP Kota Bukittinggi yang diterbitkan oleh KemenPAN RB
---------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP adalah peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintahan diubah, bukan lagi sekedar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran itu. SAKIP juga memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Selain itu, SAKIP juga memastikan penghematan anggaran melalui dihapusnya kegiatan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2021 nilai evaluasi SAKIP Kota masih menunggu SK Menteri PAN-RB diumumkan. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya,

kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Indeks Kematangan Organisasi	Hasil indeks terhadap kematangan organisasi pada seluruh SKPD
------------------------------	---------------------------------------------------------------

Indeks Kematangan Organisasi merupakan bagian dari pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah sesuai dengan arahan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018.

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah meliputi Struktur Organisasi, Budaya Organisasi dan Inovasi Organisasi. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, penilaian dan penghargaan. Penilaian dalam hal Pembinaan Penataan Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi.

Indeks Kematangan Organisasi dihitung berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, dimana hal-hal yang diukur yaitu variabel dan kualifikasi diantaranya :

- a. Perencanaan pembangunan daerah;
- b. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Penjaminan mutu layanan perangkat daerah;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perangkat daerah;
- e. Pendidikan dan pelatihan aparatur;
- f. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah;
- g. Manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur;
- h. Manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur;

- i. Pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur;
- j. Pengembangan inovasi layanan perangkat daerah; dan
- k. Budaya organisasi perangkat daerah.

Pengukuran dilakukan dengan melakukan penghitungan nilai dari survei yang terdiri atas variabel di atas, indeks didapatkan dari rentang nilai setiap variabel tersebut per tiap-tiap perangkat daerah yang telah disurvei.

Berdasarkan hasil indeks kematangan organisasi pada seluruh SKPD di peroleh nilai kematangan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021 sebesar 42,96 (Tingkat Kematangan “Tinggi”) dengan capaian indikator sebesar 86%.

Sasaran Strategis



6. Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

Sasaran Strategis dari “meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah” di ukur dengan indikator persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	100%	99%	99%

Dari tabel dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah” tahun 2021 adalah sebesar 99%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	=	Jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak terlaksana 100% / jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak
-------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capaian indikator persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak pada Tahun 2021 adalah sebesar 99%. Jumlah kontrak pada tahun 2021 adalah 547 kontrak dan kontrak yang dapat terlaksana sebanyak 545 kontrak dengan tingkat pencapaian 99%.

Jumlah kontrak yang tidak terlaksana sampai selesai berjumlah 2 kontrak, yaitu :

- 1) Pekerjaan peningkatan saluran drainase primer (SMPN 1 s/d rumah potong), disebabkan karena realisasi fisik pekerjaan sampai dengan kontrak selesai baru mencapai 67%.
- 2) Pekerjaan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH), disebabkan karena realisasi fisik pekerjaan sampai dengan kontrak selesai baru mencapai 49%.

Sasaran Strategis



7. Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah

Sasaran Strategis dari “meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah” di ukur dengan 2 indikator sebagai berikut :

1. Persentase informasi yang direspon
2. Persentase pewarta yang aktif memberitakan informasi

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah	Persentase informasi yang direspon	55%	-	Kegiatan pindah ke Diskominfo
	Persentase pewarta yang aktif memberitakan informasi	100%	-	Kegiatan pindah ke Diskominfo
Rata – rata				-

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis “meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah” tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena pada tahun 2021 kegiatan yang menunjang sasaran strategis pindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini disebabkan karena perubahan SOTK dari Bagian Humas menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dimana tugas/tupoksi kehumasan sudah pindah ke Diskominfo. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, maka keberhasilan pencapaian sasaran strategis tidak dapat ditentukan.

Sasaran Strategis**8. Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah**

Sasaran strategis dari “meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah” di ukur dengan indikator sasaran jumlah komoditas yang dikendalikan.

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	Jumlah komoditas yang dikendalikan	100	100	100%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis ”meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah” tahun 2021 adalah sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Jumlah komoditas yang dikendalikan	=	Jumlah komoditas yang dikendalikan di Kota Bukittinggi / Jumlah komoditas yang dikendalikan Provinsi Sumatera Barat
------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capaian indikator kinerja dari jumlah komoditas yang dikendalikan pada tahun 2021 adalah sebesar 100% dan sesuai target. Pada tahun 2021 jumlah komoditas yang dikendalikan di Kota Bukittinggi sebanyak 10 komoditas sama dengan jumlah komoditas yang dikendalikan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 10 komoditas. Komoditas tersebut antara lain beras, cabe, bawang, rawit, daging

sapi, daging ayam, telur ayam, tepung terigu, gula dan minyak goreng. Semakin banyak komoditas yang dikendalikan maka dapat menekan laju inflasi.

Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan sasaran strategis dan indikator sasaran untuk tahun 2017 s/d 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Tahun 2017 s/d 2021

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	1	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	2017	1.5	1.34	89%
				2018	1.75	2.05	117%
				2019	2	2.39	120%
				2020	2.25	2.63	117%
				2021	2.5	2.87	115%
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	2	Peringkat EKPP dan LPPD	2017	55	33	167%
				2018	40	29	138%
				2019	35	27	130%
				2020	35	-	-
				2021	30	-	-

		3	Jumlah MoU	2017	2	2	100%
				2018	3	3	100%
				2019	4	4	100%
				2020	5	1	20%
				2021	6	8	133%
3	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan	4	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	2017	100%	100%	100%
				2018	100%	100%	100%
				2019	100%	100%	100%
				2020	100%	100%	100%
				2021	100%	100%	100%
4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat	5	Persentase sarana ibadah aktif	2017	100%	97%	97%
				2018	100%	97%	97%
				2019	100%	97%	97%
				2020	100%	100%	100%
				2021	100%	100%	100%
		6	Persentase lembaga agama yang aktif	2017	100%	100%	100%
				2018	100%	100%	100%
				2019	100%	100%	100%
				2020	100%	100%	100%
				2021	100%	100%	100%
5	Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	7	Nilai evaluasi SAKIP Kota	2017	B	B	100%
				2018	BB	BB	100%
				2019	BB	BB	100%
				2020	A	BB	89%
				2021	A	-	Nilai belum keluar
		8	Indeks Kematangan organisasi	2017	40	-	-
				2018	40	-	-
				2019	45	44.10	98%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021

				2020	50	42.96	86%
				2021	50	42.96	86%
6	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	9	Persentase pengadaan barang dan jasa kontrak	2017	100%	100%	100%
				2018	100%	100%	100%
				2019	100%	99%	99%
				2020	100%	100%	100%
				2021	100%	99%	99%
7	Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah	10	Persentase informasi yang direspon	2017	35%	60%	171%
				2018	40%	60%	150%
				2019	45%	65%	144%
				2020	50%	88%	176%
				2021	55%	-	Kegiatan pindah ke Diskominfo
		11	Persentase pewarta yang aktif memberikan informasi	2017	NA	70%	-
				2018	100%	70%	70%
				2019	100%	75%	75%
				2020	100%	83%	83%
				2021	100%	-	Kegiatan pindah ke Diskominfo
8	Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	12	Jumlah komoditas yang dikendalikan	2017	100%	100%	100%
				2018	100%	100%	100%
				2019	100%	111%	111%
				2020	100%	100%	100%
				2021	100%	100%	100%

- a. Dari tabel dapat dilihat rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 sebesar 1,34, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 2,05, 2019 sebesar 2,39, 2020 sebesar 2,63 dan tahun 2021 sebesar 2,87. Hal ini menunjukkan semakin besar kesadaran berbagai perusahaan

potensi pemberi CSR untuk menyisihkan sebagian keuntungannya berupa dana CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

- b. Capaian peringkat LPPD Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja kunci (IKK) EKPPD telah lebih baik dan telah meningkatnya penyelenggaraan urusan di Kota Bukittinggi. Namun disebabkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2020 dan 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019 dan 2020 masih menunggu SK Menteri Dalam Negeri maka capaian kinerja indikator Peringkat EKPP dan LPPD belum dapat diukur.
- c. Jumlah MoU Kota Bukittinggi tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dari 2 MoU, 3 MoU dan 4 MoU, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu hanya ada 1 MoU dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebanyak 8 MoU melebihi target sebanyak 6 MoU.
- d. Capaian persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari tahun 2017 - 2021 sudah sesuai target yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja telah sangat baik dimana seluruh produk hukum yang disusun pada tahun berjalan dari tahun 2017 - 2021 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Persentase sarana ibadah aktif tahun 2021 sebesar 100% sama dengan tahun 2020, naik dibandingkan dari tahun 2017 s/d 2019 sebesar 97%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah sarana ibadah aktif di Kota Bukittinggi.
- f. Persentase lembaga agama yang aktif di Kota Bukittinggi konsisten dari tahun 2017 s/d 2021 yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Lembaga agama yang ada di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu aktif dan berjalan dengan baik Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah baik dan sudah sesuai target yang ditetapkan.
- g. Kota Bukittinggi berhasil mempertahankan nilai SAKIP predikat BB selama tiga tahun berturut-turut. Walaupun predikat masih sama namun terjadi peningkatan nilai dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 Bukittinggi

memperoleh nilai 70,39, Tahun 2019 memperoleh nilai 70,84, dan tahun 2020 memperoleh nilai 71,13. Tahun 2021 menunggu hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan nilai sekaligus peningkatan predikat dari BB menjadi A pada penilaian SAKIP Kota Bukittinggi.

- h. Perhitungan indeks kematangan organisasi baru dilaksanakan pada tahun 2019 setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kematangan Organisasi Perangkat daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 42,96 dengan tingkat kematangan yang sama yaitu “Tinggi”. Namun mengalami penurunan dari tahun 2019 yang nilainya sebesar 44,10, dengan tingkat kematangan yang sama yaitu “Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi masih menunjukkan hasil yang baik.
- i. Capaian persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak dari tahun 2017 - 2018 sudah sesuai target. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan akibat adanya pemutusan kontrak sebanyak 1 (satu) buah kontrak. Pada tahun 2020 capaian persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak sudah sesuai target yaitu 100%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 99% disebabkan karena adanya pemutusan kontrak sebanyak 2 (dua) buah kontrak.
- j. Persentase informasi yang direspon tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena pada tahun 2021 kegiatan yang menunjang sasaran strategis pindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini disebabkan karena perubahan SOTK dari Bagian Humas menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dimana tugas/tupoksi kehumasan sudah pindah ke Diskominfo.
- k. Persentase pewarta yang aktif memberitakan informasi tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena pada tahun 2021 kegiatan yang menunjang sasaran strategis pindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini disebabkan karena perubahan SOTK dari Bagian Humas menjadi Bagian Protokol dan

Komunikasi Pimpinan dimana tugas/tupoksi kehumasan sudah pindah ke Diskominfo.

1. Persentase jumlah komoditas yang dikendalikan pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020, dan turun dari tahun 2019 tapi masih sama dengan 2017 dan 2018 serta masih sesuai target. Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis organisasi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 telah memuat target tahunan indikator kinerja Sekretariat Daerah. Target tahunan indikator kinerja disusun dalam Perjanjian Kinerja tahunan, yang diimplementasikan dalam Renja Sekretariat Daerah yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai target pada tahun berjalan. Berikut dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target akhir pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan
Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2021
1	Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	1	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	2,5	2,5	2,87
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	2	Peringkat EKPP dan LPPD	30	30	-
		3	Jumlah MoU	6	6	8
3	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan	4	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100%
4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat	5	Persentase sarana ibadah aktif	100%	100%	100%
		6	Persentase lembaga agama yang aktif	100%	100%	100%
5	Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	7	Nilai evaluasi SAKIP Kota	A	A	-
		8	Indeks Kematangan organisasi	50	50	42.96
6	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	9	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	100%	100%	99%
7	Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah	10	Persentase informasi yang direspon	55%	55%	-
		11	Persentase pewarta yang aktif memberikan informasi	100%	100%	-
8	Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	12	Jumlah komoditas yang dikendalikan	100%	100%	100%

- a. Target akhir Renstra untuk rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD tahun 2021 sebesar 2,5, jika dibandingkan dengan rasio tahun 2021 yaitu sebesar 2,87, lebih tinggi dari target 2021 yang mana merupakan target akhir renstra. Hal ini menjadi tugas berat Kota Bukittinggi untuk terus mempertahankan agar perusahaan potensial tetap memberikan dana CSR apalagi dalam kondisi pandemi covid-19. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah menghimpun data potensial CSR dan dikoordinasikan dengan SKPD pengampu yang memfasilitasi pihak pemberi CSR. Usulan pembiayaan melalui dana CSR yang diajukan SKPD pengampu disampaikan pada forum koordinasi CSR pada tahun sebelum rencana bisnis perusahaan pemberi CSR ditetapkan agar dapat disalurkan.
- b. Target akhir Renstra untuk Peringkat EKPP dan LPPD Tahun 2021 adalah peringkat 30, Namun disebabkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2020 dan 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019 dan 2020 masih menunggu SK Menteri Dalam Negeri maka capaian kinerja indikator Peringkat EKPP dan LPPD belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target akhir renstra. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah memaksimalkan proses verifikasi di Inspektorat agar perangkat daerah dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mengadakan/menyediakan data yang diminta sehingga Inspektorat dapat maksimal dalam melakukan verifikasi data.
- c. Target akhir Renstra untuk jumlah MoU tahun 2021 sebesar 6 MoU, jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2021 yaitu 8 MoU, melebihi dari target akhir renstra. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah mengikuti tahapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 yakni: persiapan, penawaran, penyusunan Kesepakatan bersama, penyusunan Kontrak atau PKS, penandatanganan kontrak atau PKS, pelaksanaan dan penatausahaan.
- d. Target akhir Renstra untuk persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tahun 2021 sebesar 100%, jika

dibandingkan dengan realisasi dan target tahun 2021 adalah sama yaitu 100%. Hal ini menjadi tugas Pemko Bukittinggi khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk terus mempertahankan agar produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setiap tahunnya. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah mengidentifikasi Perda/Perwako yang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi dengan SKPD, memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah dan melakukan monev dengan SKPD.

- e. Target akhir Renstra untuk persentase sarana ibadah aktif tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan realisasi dan target tahun 2021 adalah sama yaitu 100%. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemko Bukittinggi agar sarana ibadah selalu aktif antara lain memberikan bantuan operasional garin masjid/mushalla, memberikan bantuan ceramah ramadhan, memberikan pelatihan imam/khatib, serta memberikan bantuan penunjang sarana dan prasarana/perbaikan gedung.
- f. Target akhir Renstra untuk persentase lembaga agama yang aktif tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan realisasi dan target tahun 2021 adalah sama yaitu 100%. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah koordinasi dengan lembaga agama terkait masalah keagamaan umat beragama mengingat hanya ada 1 lembaga agama yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi.
- g. Target akhir Renstra untuk Nilai evaluasi SAKIP Kota tahun 2021 sebesar A, jika dibandingkan dengan nilai tahun 2020 yaitu BB, lebih rendah dari target 2020 dan target akhir renstra. Tahun 2021 masih menunggu hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini menjadi tugas berat Kota Bukittinggi untuk terus menyempurnakan nilai SAKIP dengan selalu memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh KemenPAN-RB agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja secara signifikan. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah Pemerintah Kota Bukittinggi telah berupaya

mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sejalan dengan akuntabilitas keuangan serta telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari laporan evaluasi tahun sebelumnya, namun perbaikan tersebut belum dilaksanakan secara tuntas sehingga belum ada peningkatan yang signifikan dalam implementasi manajemen kinerja.

- h. Target akhir Renstra untuk Indeks Kematangan organisasi tahun 2021 sebesar 50, jika dibandingkan dengan nilai tahun 2021 yaitu 42,96, lebih rendah dari target 2021 yang merupakan target akhir renstra. Untuk meningkatkan Indeks Kematangan organisasi diharapkan komitmen Pimpinan SKPD melengkapi indikator evaluasi sesuai Permendagri 99 Tahun 2018 agar terjadi peningkatan Indeks Kematangan organisasi di akhir tahun renstra.
- i. Target akhir Renstra untuk persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan realisasi dan target tahun 2021 lebih rendah yaitu sebesar 99%. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah dengan melaksanakan monitoring ke lapangan sehubungan dengan kendala dan progres pelaksanaan pekerjaan.
- j. Target akhir Renstra untuk persentase informasi yang direspon tahun 2021 sebesar 60%. Persentase informasi yang direspon tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena pada tahun 2021 kegiatan yang menunjang sasaran strategis pindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini disebabkan karena perubahan SOTK dari Bagian Humas menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dimana tugas/tupoksi kehumasan sudah pindah ke Diskominfo.
- k. Target akhir Renstra untuk persentase pewarta yang aktif memberikan informasi tahun 2021 sebesar 100%. Persentase pewarta yang aktif memberitakan informasi tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena pada tahun 2021 kegiatan yang menunjang sasaran strategis pindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini disebabkan karena perubahan SOTK dari Bagian Humas menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dimana tugas/tupoksi kehumasan sudah pindah ke Diskominfo.

1. Target akhir Renstra untuk jumlah komoditas yang dikendalikan tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan realisasi dan target tahun 2021 adalah sama yaitu 100%. Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator antara lain melakukan pemantauan harga setiap harinya terhadap 10 komoditas kebutuhan pangan yang dikendalikan dan melaksanakan operasi pasar murah minyak goreng yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan yang dihadapi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a) Penyebab keberhasilan:

- Optimalisasi penggunaan anggaran tahun 2021 dengan penyerapan anggaran mencapai 80%.
- Adanya komitmen semua pejabat struktural dan pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.
- Koordinasi yang bagus antara Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah pada saat Rapat kerja sama dengan Perangkat Daerah Pengampu dan pihak terkait.
- Kerjasama dengan tenaga perancang dari Kanwil Hukum dan HAM dalam rangka pengharmonisasian Rancangan Produk hukum daerah sehingga setiap produk hukum daerah yang dihasilkan sudah menindaklanjuti hasil fasilitasi dan harmonisasi sehingga sangat kecil kemungkinan pencapaian indikator tidak mencapai target.
- Koordinasi yang baik dengan pengurus rumah ibadah serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan.

- Belum terbentuknya lembaga agama lain selain agama islam di kota bukittinggi sehingga memudahkan koordinasi.
- Keaktifan dari lembaga keagamaan dalam kegiatan yang ditunjang oleh pemerintah.
- Dengan adanya pendampingan langsung oleh KemenPAN RB terhadap kekurangan dari SAKIP di tahun yang lalu serta evaluasi SAKIP oleh inspektorat terhadap semua SKPD.
- Dukungan perangkat daerah, anggaran dan pihak yang terlibat dalam peningkatan kematangan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Monitoring dan evaluasi sehubungan dengan kendala dan progres pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
- Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi serta kondisi ketersediaan pasokan barang/ komoditas kebutuhan masyarakat tercukupi.

b) Penyebab kegagalan :

- Ketersediaan SDM pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang masih terbatas secara kuantitas karena ada yang pensiun, mutasi dan promosi dan belum ada gantinya.
- Pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik, namun efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belum fokus dalam pencapaian kinerja dan masih harus ditingkatkan.
- Banyaknya variabel yang diukur dalam survey kematangan organisasi sehingga diperlukan anggaran yang mencukupi untuk memenuhi beberapa variabel yang ada serta perlunya dukungan berbagai pihak serta perangkat daerah yang terlibat untuk meningkatkan kematangan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

c) Alternatif solusi yang telah dilakukan

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut :

- Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- Meningkatkan kualitas SDM dengan workshop, bimtek dan diikuti diklat yang terkait pekerjaan.
- Solusi yang dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target yaitu melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang diprediksi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah hingga sektor privat, sehingga keuangan perusahaan-perusahaan pemberi CSR dapat kembali pulih.
- Menyesuaikan ketentuan dan tata cara pelaksanaan Kerjasama daerah baik dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas.
- Melaksanakan sharing informasi dengan daerah lain untuk melihat peluang kerjasama pemerintah Kota Bukittinggi dengan daerah lain atau pihak ketiga.
- Melakukan Pemetaan Kerjasama dengan cara merekap usulan atau rencana kerjasama masing-masing Perangkat Daerah.
- Membentuk tim koordinasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri dari unsur Bapelitbang, Bagian Organisasi Kota dan Inspektorat Kota agar lebih terarah dalam penyusunan kelengkapan dokumen SAKIP.
- Melakukan koordinasi dengan Anggota TPID, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Bulog dan TTIC Provinsi Sumatera Barat.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya

Selama Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.
- Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan			APBD / APBD-P
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				58,930,043,126
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				36,562,957,163
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21,537,900
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah	3	dokumen	21,537,900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,853,905,988
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	116	orang	12,831,420,788

3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan bulanan keuangan Sekretariat Daerah	12	laporan	16,588,000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun	2	laporan	5,897,200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1	laporan	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5,555,334,854
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	12	bulan	75,640,000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	1,820,480,000
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	12	bulan	130,640,000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan	2	jenis	211,280,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar, majalah dan buku bacaan yang tersedia	14	koran majalah	60,913,500
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jasa upah kerja pegawai kontrak	13	orang	1,724,581,354
		- Makan minum dan uang lembur	50	orang	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Laporan koordinasi , konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi	12	laporan	1,531,800,000
		-Makan minum rapat/pertemuan dan diklat	12	bulan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				240,640,000
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas yang tersedia	3	unit	100,000,000
14	Pengadaan Mebel	Mebel yang tersedia	10	buah	140,640,000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				495,056,000
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah materai Rp. 10.000,-	864	buah	30,576,000
		-Jumlah Paket Pengiriman	202	kali	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air, listrik, telepon, TV parbayar	48	rekening	464,480,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,526,847,552
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-Jasa upah pegawai kontrak	13	orang	1,709,081,880
		-Pemeliharaan kendaraan roda 2,4 dan 6	95	Unit	
18	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel	5	bh	20,620,000
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10	jenis	90,640,000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-Gedung kantor terpelihara secara rutin	2	Unit	1,666,305,672
		-Jasa upah pegawai kontrak	25	orang	
		-Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12	Bulan	
		-Rumah dinas terpelihara secara rutin	1	unit	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan perlengkapan rumah tangga yang terpelihara	12	Bulan	40,200,000
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1,165,039,968
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah gaji KDH dan WKDH yang dibayarkan	12	bulan	583,099,968

23	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	stel	581,940,000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				9,058,142,901
24	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-Jasa upah pegawai kontrak	20	orang	6,020,053,881
		- Jenis Kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	17	jenis	
		-Sarana dan prasarna rumah dinas Wako	1	Unit	
25	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-Jasa upah pegawai kontrak	17	orang	2,987,449,020
		- Jenis Kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	17	jenis	
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kebutuhan rumah dinas / jabatan	6	jenis	50,640,000
	Penataan Organisasi				420,785,000
27	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-Peraturan / Keputusan tentang Anjab / ABK	1	dokumen	136,429,000
		-Perda / Perwako OPD sesuai hasil evaluasi	1	dokumen	
		-Perwako tugas pokok dan fungsi SKPD	1	dokumen	
28	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-Jumlah inovasi yang menang kompetisi tingkat propinsi	2	Inovasi	60,814,000
		-Jumlah inovasi pelayanan publik lolos Top 99 Tingkat Nasional	2	Inovasi	
		- Jumlah pemenang Tingkat Kota	3	Inovasi	
		-Indek kepuasan masyarakat Kota Bukittinggi bernilai baik	B	Baik	

29	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-Laporan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi	1	Laporan	223,542,000
		-LKIP Kota Bukittinggi	1	dokumen	
		-Peraturan / Keputusan tentang Standar Kompetensi Jabatan	1	dokumen	
		-Peraturan / Keputusan Walikota tentang Kelas Jabatan	1	dokumen	
		-Perwako Road Map Reformasi Birokrasi	1	dokumen	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				3,225,667,000
30	Fasilitasi Keprotokolan	-Penerimaan tamu pemerintah	12	Bulan	2,626,710,000
		-Penunjang untuk keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	50	Orang	
		-Uang lembur PNS dan Non PNS	50	Orang	
31	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan jumpa pers terlaksana	8	kali	43,828,000
32	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-Dokumentasi Kegiatan Pemko	1200	Foto	555,129,000
		-Jumlah kegiatan pemko terdokumentasikan	1200	Foto	
		-Jumlah profil kota yang dimuat dalam media	150	berita	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				20,597,618,000
	Administrasi Tata Pemerintahan				502,984,000
33	Penataan Administrasi Pemerintahan	-Jumlah rakor terselenggara	12	Kali	147,700,000
		-Jumlah kunjungan kerja yang difasilitasi	6	Kali	

		- Rapat kerja Nasional APEKSI	1	Kali	
34	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Jumlah kelurahan yang difasilitasi	2	kelurahan	161,007,000
		-Jumlah kelurahan yang dinilai tingkat Kota	3	kelurahan	
		-Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat monitoring dan pembinaan	3	Kali	
		-Laporan rupa bumi	1	laporan	
		-Pembinaan kelurahan untuk Tingkat propinsi	1	kelurahan	
35	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-Jumlah laporan SPM dan Monev	1	laporan	194,277,000
		-Laporan EKPPD	1	laporan	
		-LKPD Walikota Bukittinggi	45	buku	
		-Upacara Hari Pahlawan	1	Kali	
		-LPPD Kota Bukittinggi	7	buku	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				19,372,155,000
36	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-Jumlah Kafilah yang diutus	5	kafilah	3,248,877,000
		-Jumlah Mesjid yang dikunjungi pada pelaksanaan safari ramadhan Kota Bukittinggi	46	buah	
		-Jumlah tabligh akbar	1	kali	
		-Jumlah wirid pengajian	48	Kali	
		-Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan bagi dai dan mubaligh	25	orang	
		-Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan bagi remaja masjid	50	orang	
		- Jumlah kampung Ramadhan yang dinilai	6	kelurahan	

		- Jumlah mesjid dan mushalla yang diberi honor penceramah ramadhan di Kota Bukittinggi	136	buah	
		- Jumlah kafilah utusan MTQ Tingkat Kota Bukittinggi	60	khalifah	
		-Jumlah pengurus mesjid yang dilatih	50	orang	
		-Frekwensi rapat koordinasi bidang bina mental	5	Kali	
37	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	-Jumlah kelompok Hibah kepada anggota masyarakat			11,885,196,000
		-Jumlah Hibah kepada organisasi / lembaga			
		- Jumlah kalender hijriah	900	buah	
		,-Jumlah lembaga yang mengikuti Lomba DDS Kota Bukittinggi	6	lembaga	
38	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	-Jumlah jemaah haji yang difasilitasi	300	orang	4,238,082,000
		-Jumlah kegiatan khatam alquran yang diberi bantuan hadiah	60	lembaga	
		- Jumlah guru MDTA/TPQ/PQ/Pon pes yang terfikasi	881	orang	
		- Jumlah kelurahan yang pendidikan keagamaannya yang dibina	24	kelurahan	
		-Pelaksanaan rapat koordinasi dibidang kesejahteraan masyarakat	5	Kali	
		-Jumlah guru garin yang diberi honor	881	orang	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				602,850,000
39	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-Jumlah penyusunan Perda yang difasilitasi	5	Perda	169,404,000
		-Jumlah penyusunan Perwako yang difasilitasi	30	Perwako	

		-Jumlah penyusunan SK yang difasilitasi	300	SK	
40	Fasilitasi Bantuan Hukum	-Jumlah Laporan perkara yang difasilitasi	4	laporan	304,546,000
41	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-Jumlah Buku berita daerah	180	buku	128,900,000
		-Jumlah Buku lembaran daerah	180	buku	
		-Dokumen hukum yang dipublikasikan dilaman JDIH	50	peraturan	
		-Jenis produk hukum yang didokumentasikan	3	Jenis	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah				119,629,000
42	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Mou Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain	5	Kali	119,629,000
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1,769,467,963
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				587,110,800
43	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-Jumlah Pembinaan kepada BLUD	1	BLUD	443,418,000
		-Jumlah Pembinaan kepada BUMD	2	BUMD	
44	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Komoditas yang dikendalikan	10	Komoditas	53,200,000
45	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah rekomendasi rencana kebijakan dan laporan monev ekonomi mikro kecil yang dikeluarkan	4	rekomendasi	90,492,800
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				255,931,150
46	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen perencanaan	3	dokumen	89,436,250
47	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah pengadaan barang dan jasa kontrak	500	kontrak	70,845,400
		Pelaksanaan monitoring belanja modal	50	BM	
48	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah SKPD yang real anggarannya lebih 80%	25	persen	95,649,500

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				884,228,013
49	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket barang dan jasa pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD dalam satu tahun	120	Paket	675,351,255
50	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan melalui SPSE	120	Paket	136,399,758
		Jumlah pegawai kontrak	2	orang	
51	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Pegawai memiliki kompetensi pengelola pengadaan barang dan jasa	1	laporan	72,477,000
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				42,198,000
52	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan hasil monev dan rekomendasi yang dikeluarkan	4	dokumen	42,198,000

Dari uraian di atas dapat dilihat terdapat 3 (tiga) program, 19 (sembilan belas) kegiatan, dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan pada tahun anggaran 2021 untuk menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp 58.930.043.126,00.

III.2 Realisasi Anggaran

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja organisasi yang baik tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran dan untuk pencapaian kinerja dimaksud disajikan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan sasaran dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan.

Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi mengalokasikan Belanja sebesar **Rp. 54.063.176.685,00** (Lima puluh empat milyar enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi setelah mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar **Rp. 58.930.043.126,00** (Lima puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 47.018.222.249,84** (Empat puluh tujuh milyar delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah delapan empat sen) atau 80%. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

TABEL 3.12
REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
				FISIK	KEU
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH	58,930,043,126	47,018,222,249.84	90%	80%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36,562,957,163	28,137,877,768.04	85%	77%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,537,900	18,105,125	100%	84%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,537,900	18,105,125	100%	84%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,853,905,988	11,552,593,969	100%	90%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,831,420,788	11,535,286,544	100%	90%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16,588,000	13,312,550	100%	80%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,897,200	3,994,875	100%	68%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0			

5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,555,334,854	3,761,148,525	94%	68%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75,640,000	73,138,750	100%	97%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,820,480,000	1,061,962,600	80%	58%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130,640,000	101,364,610	100%	78%
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	211,280,000	204,514,535	100%	97%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60,913,500	55,601,500	100%	91%
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,724,581,354	943,256,105	80%	55%
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,531,800,000	1,321,310,425	100%	86%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240,640,000	204,249,500	100%	85%
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000	75,880,000	100%	76%
14	Pengadaan Mebel	140,640,000	128,369,500	100%	91%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495,056,000	376,139,768	100%	76%
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,576,000	25,115,000	100%	82%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	464,480,000	351,024,768	100%	76%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,526,847,552	2,871,540,954.04	89%	81%
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,709,081,880	1,535,063,271	100%	90%
18	Pemeliharaan Mebel	20,620,000	6,249,500	65%	30%
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,640,000	74,758,500	100%	82%

20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,666,305,672	1,237,203,183.04	100%	74%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,200,000	18,266,500	80%	45%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,165,039,968	913,227,582	90%	78%
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	583,099,968	573,059,782	100%	98%
23	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	581,940,000	340,167,800	80%	58%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	9,058,142,901	6,007,249,629	87%	66%
24	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6,020,053,881	3,668,947,015	90%	61%
25	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2,987,449,020	2,318,251,364	95%	78%
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	50,640,000	20,051,250	75%	40%
	Penataan Organisasi	420,785,000	281,094,393	93%	67%
27	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	136,429,000	100,789,149	100%	74%
28	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60,814,000	55,137,090	100%	91%
29	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	223,542,000	125,168,154	80%	56%
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3,225,667,000	2,152,528,323	77%	67%
30	Fasilitasi Keprotokolan	2,626,710,000	1,835,150,278	90%	70%
31	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	43,828,000	11,871,200	60%	27%
32	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	555,129,000	305,506,845	80%	55%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20,597,618,000	17,635,254,842	93%	86%

	Administrasi Tata Pemerintahan	502,984,000	331,032,253	83%	66%
33	Penataan Administrasi Pemerintahan	147,700,000	85,869,970	80%	58%
34	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	161,007,000	152,783,935	100%	95%
35	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	194,277,000	92,378,348	70%	48%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	19,372,155,000	16,756,197,593	97%	86%
36	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3,248,877,000	2,567,165,298	90%	79%
37	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	11,885,196,000	10,214,497,270	100%	86%
38	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4,238,082,000	3,974,535,025	100%	94%
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	602,850,000	444,686,400	90%	74%
39	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	169,404,000	107,345,120	90%	63%
40	Fasilitasi Bantuan Hukum	304,546,000	234,559,880	90%	77%
41	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	128,900,000	102,781,400	90%	80%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	119,629,000	103,338,596	100%	86%
42	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	119,629,000	103,338,596	100%	86%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,769,467,963	1,245,089,639.80	91%	70%
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	587,110,800	513,367,434.80	100%	87%
43	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	443,418,000	395,626,040.80	100%	89%
44	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	53,200,000	47,323,743	100%	89%
45	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	90,492,800	70,417,651	100%	78%
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	255,931,150	140,295,544	80%	55%
46	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	89,436,250	77,970,025	100%	87%

47	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	70,845,400	32,907,650	70%	46%
48	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	95,649,500	29,417,869	70%	31%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	884,228,013	551,855,874	83%	62%
49	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	675,351,255	420,130,238	90%	62%
50	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	136,399,758	114,570,611	100%	84%
51	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	72,477,000	17,155,025	60%	24%
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	42,198,000	39,570,787	100%	94%
52	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	42,198,000	39,570,787	100%	94%

Pencapaian realisasi anggaran sebesar 80% untuk realisasi keuangan sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 90%. Hal ini disebabkan antara lain regulasi, kebijakan, efisiensi anggaran, dan hal-hal tidak terduga lainnya.

Perbandingan realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Kegiatan Belanja Langsung

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)
1	2017	36.522.534.678,00	30.862.728.962,00	84,50 %
2	2018	35.816.995.367,00	30.424.321.768,00	84,94 %
3	2019	32.350.251.128,00	29.092.807.178,07	89,93 %
4	2020	26.986.576.608,00	22.700.479.539,62	84.12%
5	2021	58.930.043.126,00	47.018.222.249,84	80%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal ini seiring dengan adanya refocusing dan beberapa kegiatan yang tidak dapat berjalan maksimal sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.



BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini diawali dengan penjabaran visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud. Berdasarkan penilaian secara umum terhadap keseluruhan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam indikator kinerja utamanya dapat diambil kesimpulan bahwa hampir seluruh sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan dan penjabaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi secara umum pada Tahun 2021 adalah sebesar 104%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis tahun 2021 termasuk kategori **sangat baik**
2. Penjabaran terhadap capaian dari masing-masing indikator kinerja dari sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - ✓ **Sasaran I** : Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha
 - ✓ **Sasaran II** : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib

- ✓ **Sasaran III** : Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan
 - ✓ **Sasaran IV** : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat
 - ✓ **Sasaran V** : Mewujudkan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif
 - ✓ **Sasaran VI** : Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - ✓ **Sasaran VII** : Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah
 - ✓ **Sasaran VIII** : Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah
3. Adapun realisasi anggaran yang dapat diserap oleh Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 80%.
 4. Secara umum dapat dikatakan bahwa target yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi selama pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Strategis tahun 2016-2021 dapat dicapai dengan baik.

IV.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1. Perlu adanya inovasi dan kreativitas seluruh aparatur dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
2. Konsistensi dan komitmen seluruh aparatur dan unsur SKPD dalam upaya peningkatan pendayagunaan sumber daya secara optimal sesuai dengan fungsi dan manfaatnya agar memperoleh capaian kinerja yang lebih baik.
3. Mendorong pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

Bukittinggi, Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

